KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Alat Kelengkapan DPR - Partai Pro-Jokowi Berebut Jatah
Tanggal : Senin, 19 Januari 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

ALAT KELENGKAPAN DPR

PARTAI PRO-JOKOWI BEREBUT JATAH

"Ini seperti *puzzle*. Geser yang satu harus geser yang lain."

Riky Ferdianto
Riky_f@tempo.co.id

PERPUSTAKAAN DPR RI

JAKARTA — Partai koalisi pendukung pemerintah tak kunjung bersepakat mengenai penempatan wakil mereka dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Persoalan itu membuat pemimpin DPR menunda penetapan formasi alat kelengkapan Dewan. "Sampai sekarang masih kami komunikasikan terus," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Wuryanto, kemarin.

Kursi pemimpin seluruh alat kelengkapan DPR ditambah setelah dilakukan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penambahan itu guna mengakomodasi tuntutan partai pendukung pemerintah setelah koalisi pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden menyapu bersih seluruh kursi yang tersedia.

Berdasarkan kesepakatan, kata Bambang, partai pemerintah mendapatkan jatah 21 kursi pimpinan. Sebelas di antaranya untuk wakil ketua komisi dan sisanya untuk wakil pimpinan badan. "Penambahan kursi pimpinan dibagi secara proporsional sesuai perolehan kursi masing-masing partai," katanya.

Alokasi kursi partai bertambah lantaran Partai NasDem menolak menempatkan wakil. Walhasil, PDIP mendapatkan jatah 10 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 5 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 4 kursi, dan Hanura 2 kursi. Fraksi pendukung pemerintah

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

sedianya menyepakati jatah alokasi kursi itu sebelum reses. Tapi hal itu berubah karena permintaan sejumlah fraksi.

Protes datang dari Partai Hati Nurani Rakyat. Mereka menolak keputusan rapat yang mengalokasikan wakil mereka di Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). "Kami meminta kursi untuk wakil pimpinan komisi, tak cuma badan," ujar Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana.

Menurut Dadang, Hanura rela melepas jatah mereka memimpin BURT asalkan diganti dengan jatah wakil pimpinan untuk Komisi VI, yang membidangi perindustrian. "Kami ingin mengawal program pemerintah. Kader kami kan sekarang duduk sebagai Menteri Perindustrian," katanya.

Penjatahan kursi juga sempat memunculkan masalah bagi Partai Persatuan Pembangunan, yang tengah didera sengketa kepengurusan partai antara hasil Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta. Dalam rapat koalisi, PPP disepakati mendapatkan jatah empat kursi untuk Komisi I, IX, dan X, serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Namun, di lingkup internal mereka, ada kesepakatan lain yang membagi kursi untuk dua kubu. "Ada kemungkinan dibagi dua," ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar.

Pendukung Muktamar Surabaya berencana menempatkan Syaifullah Tamliha sebagai calon Wakil Ketua Komisi I serta Ermalena untuk Komisi IX. Sedangkan kubu Muktamar Jakarta meminta Dimyati Natakusumah duduk sebagai wakil di BURT dan Epyardi Asda untuk Badan Anggaran.

Namun usul nama yang dibahas internal fraksi itu ditolak rapat koalisi. Alasannya, Dimyati dan Epyardi adalah anggota PPP pendukung koalisi Prabowo. "Kalau platform mereka berbeda, lebih baik mereka meminta jatah kepada koalisi yang mereka dukung," kata Bambang.

Untuk menghindari polemik berlanjut, Bambang menyarankan agar partai koalisi menerima kesepakatan awal yang dibuat pada 6 Desember lalu. Jika dinilai belum memuaskan, formasi itu bisa saja diubah di tengah jalan. "Ini seperti *puzzle*. Geser yang satu harus geser yang lain," ujarnya.

● RIKY FERDIANTO

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Berebut Kursi Sisa



Badan Anggaran:
Said Abdullah (PDIP) atau **Jazilul Fawaid** (PKB)

Badan Legislasi:
Arif Wibowo (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura)

Badan Urusan Rumah Tangga:
Elva Hartati (PDIP) dan/atau wakil Hanura

Majelis Kehormatan Dewan:
Junimart Girsang (PDIP) dan/atau wakil PPP

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen:
Evita Nursanti (PDIP), **Andi Ghalib** (PPP)

● RIKY FERDIANTO

PERPUSTAKAAN DPR RI